

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN VERSTEK DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN

(STUDI PUTUSAN Nomor : 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

Triana Ningsih Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Trianamandolangit@yahoo.co.id

Abstrak

Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang – Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta perkawinan.dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik data primer yaitu dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan library research. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembagian harta perkawinan pada putusan perkara Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg dipuus secara verstek.

Kata kunci : perkawinan, perceraian, harta benda perkawinan

Abstrack

Wedding according to Civil Code only viewed in terms civil only. Unlike the Law No.1 of 1974 which looked at the wedding of his physical and spiritual bond , which does not only include physical bonding and batiniyah , but also ties in property. Related to the property deed - Law No.1 of 1974 set that permissibility couple to enter into marriage on the property in marriage . Until then the divorce happened nuptial agreements that have been made will have an impact on alliance arising from the agreement regarding the division of marital property.By using methods of sociological and juridical approach of empirical legal research , primary and

secondary legal materials derived authors analyzed using analytical techniques descriptive qualitative . Techniques primary data is by interview , while secondary data with library research . From the results of research with the above method , the authors obtained the answers to the problems are that the distribution of marital property in a verdict in the number 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg decision .

Keywords: marriage , divorce , marital property

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua individu yang telah cukup usia dalam hubungan keluarga. Kedua individu tidak lagi hidup secara terpisah melainkan saling terikat satu sama lain dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri. Melalui perkawinan suami dan istri dapat membina rumah tangga yang diharapkan dapat bertahan selamanya.

Pandangan hukum terhadap perkawinan adalah suatu perikatan antara dua subjek hukum yang mendasai munculnya hak dan kewajiban para pihak. Definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah: "...ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata nikah. Nikah diartikan melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita. Tujuannya menghalalkan hubungan fisik antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari terbentuknya sebuah perikatan dalam bentuk perkawinan. Dalam perkembangannya akibat hukum tersebut berkembang jika pasangan suami istri dikaruniai anak, sehingga di dalamnya akan muncul hak dan kewajiban orang tua dan anak. Akibat hukum lain adalah berkaitan dengan harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan.

¹ Soermiyati.1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta. Halaman 8.

Pernyataan kekal dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah membentuk ikatan lahir dan batin suami istri dengan harapan bahwa hal tersebut akan berlangsung sepanjang hidup. Tetapi pada kenyataannya seringkali ditemui berbagai masalah dalam perjalanan rumah tangga sehingga memunculkan pertentangan-pertentangan diantara keduanya yang dapat mengarahkan pada terjadinya perceraian.

Perceraian dalam UU Perkawinan diatur sebagai putusya suatu perkawinan. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian dapat dikatakan sebagai berakhirnya perikatan suami istri yang menyatu dalam hubungan perkawinan.

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan talak atau yang sepadan dengan itu.²

Sebagaimana terjadinya perkawinan, perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap harta benda. Masing-masing pihak memiliki bagian hak atas harta benda yang sebelumnya menjadi harta benda bersama atau dikenal dengan istilah harta gono gini. Harta tersebut seringkali menjadi objek sengketa yang mengikuti terjadinya perceraian sehingga harus diputuskan oleh hakim di pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam Pengadilan Agama No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan verstek tersebut dalam pembagian harta perkawinan pada kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

² Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta. Halaman 73.

C. PEMBAHASAN

1. Metode penelitian

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang persoalan – persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama da sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”. Sementara secara empiris pembagian harta bersama tersebut ditelaah di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang. Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang yang difahami dari banyaknya perceraian sehingga timbul kasus pembagian harta bersama antara suami dan isteri atau biasa disebut dengan pembagian harta gono gini.

B. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menguji dan mengkaji aspek-aspek hukum tentang dasar dan kekuatan hukum putusan hakim dalam kaitannya dengan ditetapkannya putusan verstek sehubungan dengan gugatan pembagian harta bersama.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang dijadikan lokasi penelitian karena :

1. Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Di Pengadilan Agama Kota Malang peneliti dapat mengetahui dan mendapatkan secara langsung proses kasus dan putusannya.
3. Kedua hal tersebut merupakan alasan bersifat substansi dan metodologi sehingga dengan kedua alasan tersebut pemilihan lokasi menjadi dapat dipercaya (reliable).

Penentuan dan pembatasan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga dapat terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan.

D. DATA PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang dan dari kalangan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari buku – buku tentang hukum perjanjian perkawinan harta bersamadan hukum harta kekayaan maupun tentang perceraian. Seluruh data tersebut merupakan bagian dari data sekunder yang bersumber dari buku tentang hukum keluarga, demikian juga literatur, peraturan – peraturan maupun catatan – catatan penting lainnya yang menjadi data penunjang dari data primer.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang pembagian harta perkawinan menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada semua responden di Kota Malang.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini.

a. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik deskriptif analisis yaitu metode yang menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah,

pendapat para ahli serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan penelitian ini.

F. ANALISIS DATA

Dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Hasil penelitian dan pembahasan

Guna memberikan gambaran penting tentang perkara pembagian harta perkawinan yang diputus secara verstek, berikut diuraikan secara singkat pokok-pokok putusan hakim sebagai berikut.

1. Tentang para pihak

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang. Tergugat umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia

2. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang , pada tanggal 12 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak umur 8 tahun dan 4 tahun.

Berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana maksud dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 97 buku I Hukum Perkawinan tersebut di atas masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

3. Tentang gugatan

Penggugat memohon agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (gono-gini) menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan agar dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang dikuasai kepada Penggugat secara sukarela, sekaligus dan seketika.

Penggugat mohon putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Tentang pokok putusan

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
- c. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Malang, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1389, surat ukur tanggal 22 Agustus 2000 luas 60 m² atas nama TERGUGAT adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- d. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat;
- e. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- f. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000;(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg. merupakan bentuk putusan verstek dengan dasar ketidakhadiran tergugat/wakilnya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Secara ringkas menurut pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa tergugat:

- a. Tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi
- b. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.

Kedua pertimbangan di atas mengandung unsur-unsur mendasar yang berkaitan dengan faktor – faktor penyebab perkara pembagian harta perkawinan dalam putusan No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek, yaitu :

a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi(official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), tingkat banding di pengadilan tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam hal jurusita tidak bertemu dengan orangnya sendiri ditempat tinggalnya atau dimana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidak-tidaknya orang yang serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang yang menerima surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara panggilan tersebut. Yang menyangkut anak hendaknya dibatasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Apabila dirumah yang bersangkutan tidak terdapat orang-orang yang disebutkan tadi maka barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar atau orang yang paling tepat dalam hal ini adalah ketua RT atau Kepala desa. Bila yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, maka panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipanggil tersebut. Relas panggilan kemudian dikirimkan kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara.³

Hukum acara perdata di pengadilan agama mengatur pemanggilan yang patut dan sah atau resmi sebagai berikut:

- a. Panggilan harus dilakukan oleh Juru sita/Pegawai yang berwenang
- b. Disampaikan kepada pihak/kuasanya langsung;
- c. Disampaikan di tempat tinggal pihak atau tempat kediaman yang nyata/tempat kuasanya berkantor;

Jika pihak/kuasanya tidak dijumpai ditempat tinggal atau ditempat kediamannya yang nyata/di tempat kuasa berkantor maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan;

- a. Jika pihak telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya;
- b. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya disampaikan melalui kepala desa dimana pihak tersebut terakhir bertempat tinggal sebelum meninggal dunia;
- c. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti disampaikan melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

Dalam kasus perceraian tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti panggilan diumumkan dalam media massa setempat sebanyak dua kali dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika penggugat dan tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir maka penggugat dipanggil kembali dan tergugat dipanggil melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

Jarak waktu pemanggilan dengan hari persidangan minimal 3 hari kerja, tidak termasuk hari panggilan dilakukan jika panggilan tersebut dilakukan kepada pihak yang bersangkutan/kuasanya.⁴

Salah satu hal yang melatarbelakangi perkara Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg atau pembagian harta bersama yaitu terjadinya perceraian antara pengugat dan tergugat karena adanya ketidakcocokan selama perkawinan berlangsung. Selain itu, penggugat mengaku hal lain yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut karena faktor ekonomi. Mereka menganggap kurang bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perbedaan prinsip, besarnya rasa ego pada masing – masing pihak dan faktor ekonomi rupanya sudah membuat semuanya berujung pada perceraian⁵ Menurutnya tidak ada ikatan perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi, pada saat perceraian berlangsung maka dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan kedudukan antara masing – masing pihak memperoleh dan atau berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut. Tergugat mengungkapkan bahwa adanya sedikit rasa terbebani dengan permasalahan ini sehingga ia jatuh sakit dan tidak dapat hadir dalam persidangan. Ia pun memang sengaja tidak mengirim surat, wakil dan sebagainya karena ia juga mengaku tidak adanya surat panggilan yang ditujukan untuknya⁶.

b. Tergugat dan/atau wakil/kuasanya tidak hadir menghadap persidangan pada waktu yang ditentukan

Secara sederhana hal ketidakhadiran tergugat dan/atau wakil/kuasanya dalam persidangan berarti hanya satu pihak yang berperkara yang ada dalam persidangan tersebut yaitu penggugat. Apabila dalam sidang pertama penggugat /pemohon hadir, sedangkan tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat / termohon sekali lagi
- b. Menjatuhkan putusan verstek

⁴ Edi Riadi. 2010. Hukum Acara Peradilan Pidana. Makalah disampaikan dalam acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama se wilayah PTA Pekanbaru tanggal 24 Juni 2010 di Pekanbaru. Hal.9.

⁵ Hasil wawancara oleh Penggugat Malang 30 Desember

⁶ Hasil wawancara oleh Tergugat Malang 30 Desember

Dan jika tergugat/termohon telah dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir, maka dapat dijatuhkan putusan verstek. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat / termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
2. Tergugat / termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah.
3. Penggugat / pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan (Pasal 125 HIR atau Pasal 149 R.Bg) Dalam hal terjadi demikian, maka hakim menasehati agar penggugat / pemohon mengurungkan / mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat / pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadir tergugat (verstek).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Faktor – faktor penyebab pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah sebagai berikut :
 - a) Karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Malang.
 - b) Karena tergugat tidak pernah mengajukan bantahan maupun eksepsi dalam perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg
 - c) Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat telah didasarkan pada berbagai alasan dan pertentangan serta tidak melawan hukum. Sehingga demikian, maka telah dipenuhi syarat dan bahwa perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek.
2. Putusan verstek dalam perkara pembagian harta perkawinan yaitu perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg memang tidak serta merta mempunyai ketentuan hukum yang tetap (*inkracht*) karena tergugat diberi waktu 14 hari setelah salinan putusan disampaikan padanya dan atau pada hari ke 8 setelah *aanmaning* tergugat tidak melakukan perlawanan (*verzet*), sehingga dengan demikian putusan tersebut secara otomatis menjadi *inkracht* dan dapat dilaksanakan. Dan pembagian harta antara penggugat dan tergugat tetap dilaksanakan meskipun tanpa melalui jalur persidangan.

2. Saran

1. Hakim hendaknya bersikap bijaksana dalam menjatuhkan putusan verstek agar memenuhi kriteria kepatutan berkaitan dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Sebagai dasar hukum putusan verstek.
2. Pihak yang berperkara hendaknya memahami bahwa putusan verstek pada dasarnya hanya bernilai formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil sehingga tidak serta merta memiliki kekuatan hukum pada saat diucapkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, 2003, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 3, 2004.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Semarang : Itikad Baik.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, FH-Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan I, 2005.
- Mochammad Djais, 2006, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- Sarwono, S.H, M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, 2011
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, Universitas Indonesia Jakarta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- T. Jafizham, 1977, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Islam*, Medan : CV. Mestika
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Zahri Hamid, 1978, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.

Undang – Undang :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet :

<http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-harta-bersama.html>

<http://areiinlander.blogspot.com/2010/12/analisis-pembagian-harta-perkawinan.html>

<http://www.makalahkuliah.com/2012/06/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>

<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/08/pembagian-harta-bersama-setelah.html>